

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mendapatkan pendidikan yang layak adalah hak setiap warga negara Indonesia, warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki tanpa memandang status, pemerataan dalam memperoleh akses dan kualitas dalam bidang pendidikan. Melalui pendidikan menjadikan warga negara Indonesia memiliki pengetahuan dan keterampilan. Hal ini akan mendorong terbentuk manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan mendapatkan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu serta relevansi pendidikan untuk menghadapi tantangan perubahan kehidupan nasional dan global. Mengacu pada Visi Pendidikan Nasional tahun 2025 yaitu: “menghasilkan insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif” atau insan kamil/paripurna maka tema pembangunan pendidikan periode tahun 2015 sampai dengan 2019 difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan nasional dalam rangka mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang unggul dan kompetitif di tingkat regional. (<https://psmk.kemdikbud.go.id>)

Salah satu faktor yang menjadi penentu tingkat keberhasilan pembangunan sumber daya manusia adalah tersedianya sumberdaya manusia yang memiliki kualitas dan mampu mendukung laju pertumbuhan ekonomi sesuai perkembangan industri modern yang berbasis pada sistem informasi yang berubah dengan cepat. (*portal.ditpsmk.net/epub*) Oleh karena itu kualitas pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan negara.

Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan jalur formal setelah pendidikan dasar, bentuk sekolah menengah atas adalah Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri serta mengikuti pendidikan lebih lanjut (*telkomuniversity.ac.id*). Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan menengah mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja pada bidang keahlian tertentu. Dedi Purwana & Usep Suhud, (2017: 349) Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bertujuan untuk membekali lulusannya dengan keterampilan tertentu dan mempersiapkan lulusan yang tidak hanya terfokus untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi akan tetapi juga siap untuk memasuki dunia kerja, membuka usaha, dan siap untuk ditraining. Widyabakti Sabatari & V. Lilik Hariyanto, (2013: 285-293) Implementasi program tersebut secara komprehensif dapat dirunut dari pendidikan kejuruan dan model pembelajaran kewirausahaan.

Pengangguran yang terjadi di Indonesia masih menjadi masalah perekonomian yang sangat kompleks disebabkan oleh peningkatan laju pertumbuhan angka pencari kerja yang tinggi tanpa diimbangi laju pertumbuhan

lapangan kerja yang tersedia. Data BPS tahun 2017 menunjukkan bahwa persentase tingkat pengangguran terbuka bulan Februari mencapai 5,33% dari total angkatan kerja 131,55 juta orang, hal ini berarti jumlah pengangguran terbuka yang ada di Indonesia mendapai 7,012 juta orang (Sumber Data Biro Pusat Statistik Tahun 2017). Jika jumlah pengangguran terbuka digolongkan dari tingkat pendidikan akhir yang ditamatkan, maka tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMA dan SMK menduduki posisi tertinggi, dengan jumlah pengangguran 1,552,894 dan 1,383,022. Berdasarkan data pada tahun sebelumnya yaitu di bulan Februari 2016, tingkat pengangguran terbuka untuk lulusan SMK sebesar 1,348,32. (Sumber Data Biro Pusat Statistik Tahun 2017) Data pengangguran yang terjadi tersebut adalah besar, bila mengacu kepada hakikat dan tujuan dari pendidikan di SMK yang akan mencetak lulusan yang siap bekerja atau membuka lapangan kerja. Permasalahan yang terjadi adalah bagaimana angkatan kerja bisa “siap bekerja”. Bila siap bekerja itu diartikan sebagai kesiapan melamar pekerjaan pada perusahaan maka akan menimbulkan permasalahan pengangguran. Kondisi ini yang harus diperhatikan dan dicarikan solusi pemecahan permasalahannya oleh pemerintah.

Pertanyaan mendasar yang terjadi adalah, bagaimanakah peran yang dilakukan SMK selama ini?, apakah pihak SMK tidak mampu menyiapkan lulusan untuk memasuki dunia kerja atau membuka lapangan kerja? Sesuai amanat undang-undang yang menyatakan bahwa pendidikan menengah kejuruan mengutamakan bagaimana menyiapkan siswa SMK agar dapat memiliki keahlian khusus (UU RI No. 20 Th. 2003 ps. 15). Cahoun dan Finch dalam Sonhaji Ahmad, (2012: 154) mengatakan pendidikan kejuruan sebagai program

pendidikan yang terorganisasi secara langsung dan berkaitan dengan persiapan individu untuk memasuki dunia kerja. Bila mengacu kepada pernyataan ini, maka SMK sudah seharusnya mampu menyiapkan lulusan yang terampil dan siap bekerja di bidang tertentu sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya.

Umumnya, pengangguran terjadi disebabkan oleh jumlah angkatan kerja atau para pencari kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada. Kondisi ini hanya berlaku ketika angkatan kerja adalah mereka yang hanya mencari pekerjaan (*job seeker*) dan tidak berlaku bagi pencipta lapangan kerja, yaitu para wirausahawan (*entrepreneur*) atau pekerja mandiri (*independent worker*). Wirausahawan tidak mengenal istilah jumlah keterbatasan lapangan kerja, karena mereka berpendapat bahwa lapangan kerja tidak untuk dicari melainkan diciptakan. Apabila paradigma kewirausahaan ini dipahami dan diterapkan di SMK, maka akan lebih banyak lulusan SMK yang menjadi wirausahawan atau *entrepreneur* yang pada akhirnya akan mengurangi jumlah pengangguran dari lulusan SMK.

Untuk menanggulangi masalah pengangguran tidak hanya dilakukan dengan membuka lowongan pekerjaan, karena hal tersebut hanya akan menanggulangi pengangguran pada saat itu saja namun yang harus dipikirkan adalah bagaimana selanjutnya angkatan kerja yang akan terbentuk selanjutnya? Pemerintah dan pihak swasta berusaha membuka lowongan kerja untuk dapat menampung kurang lebih 7,012 juta orang per tahun. Dibutuhkan suatu usaha internal dari angkatan kerja yang bersangkutan untuk mengurangi pengangguran, salah satu usahanya adalah dengan berwirausaha dan menciptakan lowongan kerja sendiri, hal ini diperlukan bekal pendidikan dan *mindset* yang kuat tentang

kewirausahaan. Hal ini tidak dapat dilakukan secara instan namun harus dilakukan sejak dini dan terus menerus berkelanjutan. Generasi muda harus di bekali dengan pendidikan kewirausahaan sejak dini dan berkelanjutan sehingga saat mereka memasuki angkatan kerja, mereka mampu menciptakan lapangan kerja mandiri.

H.A.R. Tilaar, (2012: 12) dalam tulisannya menyatakan bagaimana pentingnya memasukkan pendidikan kewirausahaan (*entrepreneur*) di dalam kurikulum nasional dalam rangka mempersiapkan siswa Indonesia memasuki dunia kerja Kementerian Pendidikan Nasional sudah mencanangkan pendidikan kewirausahaan di dalam kurikulum nasional, bahkan beberapa perguruan tinggi telah membentuk serta menerapkan kuliah kewirausahaan sejak beberapa tahun silam, dan diikuti oleh beberapa sekolah menengah namun demikian munculnya wirausaha-wirausaha baru di Indonesia masih jauh dari harapan dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kondisi ini menimbulkan sebuah tanda tanya bagai mana seharusnya pendidikan yang di berikan kepada para siswa agar dapat menjadi wirausaha yang handal dan berkarakter?

H.A.R. Tilaar, (2012: 5) mengatakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh sistem pendidikan barat adalah kemampuan dari sistem pendidikan yang mampu mendorong lahirnya kreativitas dari peserta didik. Sifat kreatif dan kritis ini merupakan dua elemen yang mutlak dan penting yang harus diperoleh setiap peserta didik saat mereka ke luar sebagai lulusan dari suatu lembaga pendidikan formal. Kondisi ini sangatlah berbeda dengan sistem pembelajaran yang dilakukan dan diterapkan di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk terciptanya wirausaha baru. Sistem pembelajaran yang berlaku di Indonesia masih mengacu kepada sistem dan starategi pedagogi dimana guru menjadi fokus di dalam proses

belajar mengajar di kelas. Pedagogi merupakan suatu sistem pengajaran di mana guru menjadi pusat dan sumber utama yang memberikan ide-ide dan contoh, sedangkan peserta didik di posisikan sebagai objek dari proses belajar mengajar. Sistem pedagogi seperti ini tidak memungkinkan lahirnya peserta didik yang mempunyai jiwa kreativitas. Hal ini disebabkan karena ketergantungan peserta didik kepada guru dalam aktifitas belajar mengajar. Sehingga tidak mengherankan jika pola pikir yang dimiliki peserta didik sepenuhnya merupakan cermin dari proses yang dilakukan secara satu arah yang diterima selama mereka di sekolah.

Usman & Raharjo, (2012: 144-147) dalam penelitiannya yang dilakukan di Harvard University Amerika Serikat menjelaskan bahwa seseorang untuk meraih sukses tidak dapat ditentukan oleh faktor pengetahuan dan kemampuan teknis (*hard skill*) yang dimilikinya namun lebih di tentukan oleh kemampuan *soft skill*. Tidak sedikit orang bisa sukses dan berhasil yang lebih dikarenakan kemampuan *soft skill* dibandingkan kemampuan *hard skill*. Kondisi ini dengan jelas dapat menggambarkan bahwa kualitas dari pendidikan kewirausahaan yang memiliki karakter sangat diperlukan oleh peserta didik. Peningkatan kualitas dari suatu sistem pembelajaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari kualitas proses belajar beserta faktor lain yang kualitas proses belajar perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh pusat penelitian kebijakan dan inovasi pendidikan dapat informasi bahwa pendidikan kewirausahaan mampu menghasilkan persepsi positif mengenai profesi sebagai wirausaha. Persepsi positif profesi wirausaha memberi dampak bagi usaha dalam proses menciptakan dan mengembangkan wirausaha maupun usaha-usaha baru yang di perlukan bagi kemajuan Indonesia

Kita kembali pada ulasan awal, bahwa masalah pengangguran tidaklah dapat di selesaikan dengan mudah, untuk menanggulangnya sangat diperlukan pendidikan yang bermutu. Melalui menerapkan manajemen program kewirausahaan yang berkarakter sebagai pendidikan dasar, maka di harapkan kelak Bangsa Indonesia dapat melahirkan wirausahawan yang sukses, sehingga angkatan kerja tidak perlu mencari kerja namun dapat menciptakan lapangan kerja sendiri bagi dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Saharuddin, (2011: 1) mengatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang di harapkan dapat mencetak lulusan yang memiliki kompetensi di bidang tertentu sehingga lulusannya mempunyai pengetahuan tentang kewirausahaan. Tujuan pendidikan SMK menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa “pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”.

Sekolah menengah kejuruan diharapkan mampu untuk mendorong inisiatif peserta didik berwirausaha, sehingga saat lulus peserta didik tersebut tidak hanya mengandalkan ketersediaan lapangan kerja namun dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan bahkan dapat memberikan peluang pekerjaan untuk orang lain. Melalui program wirausaha lulusan SMK mampu untuk mengembangkan diri sesuai dengan minat dan tuntutan perkembangan jaman, secara mandiri sebagai wirausaha bukan hanya sekedar menunggu lowongan pekerjaan.

Agar dapat menciptakan lulusan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau berwirausaha maka pendidikan yang diberikan di SMK harus berorientasi pada pendidikan yang berwawasan kewirausahaan. Menurut

Joko Sutrisno, (2003: 3) “pendidikan yang berwawasan kewirausahaan adalah: pendidikan yang menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan hidup (*life Skill*) pada peserta didik melalui kurikulum yang dikembangkan di sekolah. Pendidikan seperti yang tersebut di atas adalah pendidikan yang berorientasi pada pembentukan jiwa kewirausahaan, jiwa yang memiliki keberanian, kreatif mandiri, dan mempunyai kemampuan dalam menghadapi problem serta dapat mencari solusi yang terbaik, selain memberikan bekal kecakapan hidup kepada peserta didik sekolah menengah kejuruan juga harus mampu membentuk sikap dan perilaku kewirausahaan peserta didik. Kenyataannya di SMK umumnya hanya memberikan keterampilan wirausaha yang masih mengarah pada keterampilan kerja sehingga kemampuan yang diberikan tersebut hanya dapat menjadikan peserta didik seorang pekerja atau buruh tanpa menanamkan jiwa kewirausahaan kepada peserta didik.

Keterampilan yang membentuk peserta didik menjadi wirausaha akan memberikan hasil yang optimal bila seorang pendidik mampu melakukan, mengatur dan mengarahkan pengalaman belajar dari peserta didik melalui prosedur yang tersusun secara terarah dan sistematis. Pengalaman belajar peserta didik ini merupakan suatu pengetahuan tentang kewirausahaan yang biasa di alami dan di kenal sebelumnya oleh peserta didik serta memberikan pengalaman langsung pada peserta didik dalam menjalankan wirausaha. Selain itu, pendidikan juga harus memberikan informasi yang terbuka kepada peserta didik berkaitan dengan kendala dan kegagalan yang akan dihadapi peserta didik.

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Economic Community atau lebih di kenal dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (selanjutnya disebut

sebagai “MEA”) merupakan upaya bersama yang disusun untuk merealisasikan salah satu tujuan pembentukan ASEAN yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah Asia Tenggara. Menurut Wahyuni Bahar (2015: 1) melalui MEA akan tercipta ASEAN sebagai pasar tunggal yang lebih dinamis dan kompetitif dalam upaya akselerasi atas integrasi regional dalam sektor prioritas dan akses pelaku usaha maupun tenaga kerja yang terampil. Salah satu aspek penting yang perlu dibenahi dalam menghadapi MEA adalah kualitas SDM yang mampu bersaing dengan negara-negara lain. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk berperan aktif dalam mempersiapkan SDM yang memadai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menjamin pembangunan SDM tersebut adalah dengan menarik minat masyarakat untuk terjun ke dunia wirausaha. Dalam bidang pendidikan upaya tersebut ditunjukkan dengan memasukkan mata pelajaran kewirausahaan ke dalam kurikulum sekolah khususnya pada tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Subijanto, (2012: 163-173) mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah mengimplementasikan pendidikan kewirausahaan sebagai salah satu wujud nyata untuk menumbuhkan jiwa kreatif, inovatif, sportif, dan wirausaha dalam metodologi pendidikan sebagai penjabaran dari ekonomi kreatif

Kurikulum pendidikan wirausaha dapat dijadikan instrumen dalam mengubah sikap dan mental dari manusia Indonesia. Pendidikan kewirausahaan dapat dijadikan sebagai pelajaran di semua lembaga pendidikan formal yang di mulai dari pendidikan dasar hingga ke jenjang pendidikan tinggi. Bila mana sistem pendidikan kewirausahaan ini dilaksanakan secara tepat, sistematis dan

berkelanjutan maka akan tercipta generasi muda yang memiliki sikap kreatif, kritis, jujur, berkarakter, dan keahlian, serta memiliki budaya wirausaha yang handal. Semua sifat dan sikap ini sangat penting dan diperlukan untuk menjadi pengusaha yang sukses dan handal yang bukan hanya sekedar pengusaha yang mengandalkan keberhasilan karena nepotisme, kolusi semata namun menjadi pengusaha yang memiliki karakter dan mental yang kuat sehingga mampu bersaing dalam dunia usaha yang ditekuninya.

Untuk mencetak seorang wirausahawan, tidak dapat dilakukan secara parsial, namun semua pihak atau unit-unit yang terkait perlu menangani secara terpadu. Keterpaduan antara lain melibatkan LPTK sebagai lembaga penghasil guru SMK, model pembelajaran di SMK, unit produksi di SMK, dan keterlibatan dunia usaha dan industri (DUDI) melalui Praktek Kerja Industri (Prakerin). Joko Widodo, Samsudi & Trisnani, (2016: 2) berpendapat bahwa selama ini masing-masing unit penyelenggara program di SMK dan penyiapan calon guru SMK oleh LPTK terkesan kurang terpadu dan *roadmap* untuk mencetak wirausahawan kurang jelas.

Kurikulum SMK yang berlaku sebelumnya (1995, KBK, KTSP), mata pelajaran kewirausahaan diberikan mulai kelas/tingkat I hingga III (Kurikulum SMK). Namun demikian *outcome* yang dihasilkan belum sesuai harapan karena masih banyak lulusan yang menganggur. Hal ini tidak lepas dari kompetensi guru pengampu mata pelajaran Kewirausahaan di SMK, tidak dipersiapkan khusus oleh LPTK (Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan).

Kewirausahaan adalah mata pelajaran yang bertujuan untuk membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar agar siswa mampu membuka

lapangan pekerjaan sendiri, setelah lulus dari SMK diharapkan para lulusan SMK mampu untuk berinisiatif serta berani untuk berwirausaha. Melalui program pendidikan kewirausahaan diharapkan lulusan SMK mampu mengembangkan diri secara mandiri sesuai dengan tuntutan dan perkembangan jaman. Program pembelajaran merupakan program yang dilaksanakan oleh guru untuk mengembangkan kompetensi, indikator, dan tujuan-tujuan pembelajaran dalam suatu proses pembelajaran di kelas. Suatu program pembelajaran harus dipandang secara keseluruhan mulai dari konteks program, perencanaan program, pelaksanaan program, serta hasil dari program tersebut, sehingga keberhasilan suatu program pembelajaran sangat bergantung pada sejauh mana kompetensi, indikator dan tujuan-tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

Menurut Dedi Purwana & Usep Suhud, (2017: 350) ada banyak hal untuk mempersiapkan dan mendorong siswa untuk menjadi entrepreneur. Salah satu aspek penting yang harus diberikan adalah pendidikan kewirausahaan yang tepat. Karena itu, sejak 2013, pendidikan kewirausahaan sudah menjadi wajib bagi siswa SMA. Secara bertahap pemerintah akan memberlakukan kurikulum 2013, mata pelajaran kewirausahaan juga tetap dipertahankan dengan nama mata diklat prakarya dan kewirausahaan. Mata diklat ini merupakan mata diklat wajib kelompok B yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dapat dilengkapi muatan yang berkearifan lokal sesuai potensi sekolah dan daerah. Mata diklat prakarya dan kewirausahaan wajib ditempuh semua siswa sejak semester 1 sampai semester 6 dan merupakan unsur penting dalam sistem penyelenggaraan pembelajaran di SMK. Bagaimana model pembelajaran

kewirausahaan yang tepat, dalam arti mampu memberikan kontribusi signifikan dalam menyiapkan lulusan SMK yang mampu berwirausaha, perlu dikaji lebih jauh.

Selain aspek guru dan model pembelajaran, dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah terdapat unit atau program tidak terdapat di sekolah menengah umum (SMA), yaitu adanya unit bisnis atau unit produksi dan program Praktik Kerja Industri (Prakerin). Unit dan program pendidikan tersebut sebetulnya sangat relevan dengan upaya menyiapkan lulusan SMK untuk menjadi wirausahawan. Melalui unit bisnis/unit produksi, siswa dapat berlatih berwirausaha dengan menjual produk atau jasa yang dibutuhkan pasar, utamanya yang sesuai potensi lokal daerah setempat.

Demikian juga dalam penyelenggaraan Praktik Kerja Industri (Prakerin) yang merupakan implementasi dari program Pendidikan Sistem Ganda (PSG) yang dicanangkan sejak tahun 1995 justru memperkuat paradigma penyiapan lulusan SMK sebagai buruh yang mengisi lowongan pekerjaan di industri. Sebelum adanya kebijakan program PSG, nama program ini adalah PKL (Praktik Kerja Lapangan) di mana istilah ini lebih tepat karena siswa SMK dengan jumlah bidang keahlian sangat beragam (9 bidang keahlian, 46 program keahlian dan 128 paket keahlian, sesuai spektrum keahlian SMK 2013, tidak mungkin semuanya sebagai buruh industri. Untuk itulah perlu adanya inovasi atau pengembangan model Prakerin yang tidak hanya berorientasi pada penyiapan lulusan SMK untuk menjadi buruh industri tetapi juga menyiapkan wirausahawan. Namun demikian hasil dari proses pembelajaran pendidikan kewirausahaan di SMK masih belum

optimal bilamana dilihat dari tingkat keberhasilannya, selain itu masih banyak kesenjangan-kesenjangan yang terjadi dan ditemukan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap program kewirausahaan yang telah dilaksanakan di SMK saat ini oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian disertasi ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan melakukan penilaian terhadap hasil dari pelaksanaan program kewirausahaan di SMK. Penelitian kualitatif menjelaskan suatu permasalahan yang menjadi bahan penelitian walaupun dengan sedikit informan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Umumnya cara yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara secara mendalam serta melakukan proses membentuk forum grup diskusi/*Focus Group Discussion* (FGD). Penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam suatu penelitian kualitatif menggunakan logikan induktif yaitu dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus yang dilanjutkan ke hal-hal yang bersifat lebih umum dengan berdasarkan data atau informasi yang terbentuk kemudian dikelompokkan ke dalam suatu konsep.

Responden studi terdiri atas kepala sekolah, guru, pemerintah daerah, tokoh masyarakat di bidang tata boga, komite sekolah, perwakilan dunia usaha dan dunia industri, Analisis deskriptif mencakup komponen pelaksanaan program pembelajaran berbasis keunggulan lokal termasuk ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan pendidik, dan ketersediaan dana operasional, serta

kebermanfaatan program PBKL bagi peserta didik maupun nilai tambah ekonomi (kesejahteraan) bagi masyarakat di lingkungan sekolah.

Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu penjelasan tentang program manajemen kewirausahaan yang dilaksanakan di SMK yang berada di Propinsi Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta dengan mengambil rujukan di SMK Negeri 3 Kota Tangerang Banten, SMK Negeri 2 Kota Depok Jawa Barat dan SMK Negeri 30 Jakarta. Pada penelitian disertasi ini jarang ditemukan angka-angka karena dalam penelitian ini tidak melibatkan angka-angka. Oleh sebab itu, data akan disajikan dalam bentuk kata-kata dan bukan berupa angka-angka.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian disertasi ini adalah evaluasi terhadap program kewirausahaan yang telah dan sedang dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mencakup pokok bahasan yang meliputi perencanaan program kewirausahaan Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud; pelaksanaan program kewirausahaan; keefektifan pelaksanaan program kewirausahaan dan internalisasi nilai-nilai kewirausahaan.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub fokus dalam penelitian disertasi ini melakukan evaluasi terhadap program kewirausahaan yang telah dan sedang dilakukan oleh Direktorat

Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut; Perencanaan manajemen program kewirausahaan yang diterapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemedikbud di SMK yang ada saat ini, kaitannya dengan:

- a. Kompetensi guru mata diklat kewirausahaan, yang dikaji mulai dari sistem penyiapan guru oleh LPTK dan praktik penyelenggaraan belajar-mengajar kewirausahaan yang berlangsung selama ini.
 - b. Model pembelajaran di SMK, khususnya pada mata pelajaran kewirausahaan serta mata pelajaran lain yang terkait dalam rangka menyiapkan lulusan SMK yang nantinya dapat menjadi wirausahawan.
 - c. Penyelenggaraan unit produksi atau *business center* di SMK yang mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, manajemen, kebijakan pimpinan, hasil yang telah dicapai, dan faktor lain yang terkait.
 - d. Penyelenggaraan Praktik Kerja Industri (Prakerin) di SMK yang mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana, manajemen, kebijakan pimpinan, hasil yang telah dicapai, dan faktor lain yang terkait.
3. Pelaksanaan manajemen program kewirausahaan yang diterapkan oleh Direktorat Pembinaan SMK Kemdikbud dilaksanakan di SMK, kaitannya dengan:
- a. Menyiapkan guru mata diklat Kewirausahaan oleh LPTK sehingga dalam praktik KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) mempunyai kompetensi yang mendukung dalam menyiapkan lulusan untuk menjadi wirausahawan.

- b. Membuat perbaikan model pembelajaran di SMK, khususnya pada mata pelajaran kewirausahaan serta mata pelajaran lain yang terkait dalam rangka menyiapkan lulusan SMK yang nantinya dapat menjadi wirausahawan.
 - c. Memperbaiki model manajemen unit produksi atau *business center* di SMK yang mendukung penyiapan siswa/lulusan untuk menjadi wirausahawan.
 - d. Memperbaiki model manajemen Praktik Kerja Industri (Prakerin) di SMK yang mendukung penyiapan siswa/lulusan untuk menjadi wirausahawan.
4. Keefektifan produk dari hasil penyelenggaraan manajemen program kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan, dalam menyiapkan atau mencetak lulusan untuk menjadi wirausahawan?
 5. Pemanfaatan dari hasil penyelenggaraan program kewirausahaan di SMK

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas bahwa program kewirausahaan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud akan difokuskan pada:

1. Bagaimana perencanaan program kewirausahaan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
2. Bagaimana pelaksanaan program kewirausahaan Direktorat Pembinaan SMK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan?
3. Bagaimana keefektifan pelaksanaan program kewirausahaan?
4. Bagaimana internalisasi nilai-nilai kewirausahaan?

5. Bagaimana reaksi Guru setelah pelatihan program kewirausahaan terhadap penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan?
6. Bagaimana pemahaman guru peserta pelatihan kewirausahaan terhadap materi pelatihan atau tingkat daya serap guru peserta program pelatihan pada materi pelatihan yang telah diberikan?
7. Bagaimana perilaku kerja guru peserta pelatihan kewirausahaan setelah kembali ke sekolahnya masing-masing?
8. Bagaimana dampak perubahan perilaku kerja guru peserta pelatihan terhadap tingkat keberhasilan proses belajar mengajar kewirausahaan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoritis berbagai pemikiran, konsep dan gagasan teoritis yang dikemukakan di dalam penelitian disertasi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan pada perkembangan ilmu pengetahuan mengenai manajemen, khususnya dalam kaitannya dengan pembelajaran kewirausahaan dan evaluasi program pelaksanaan kewirausahaan di SMK.
2. Manfaat secara praktis
 - a. Bagi guru kewirausahaan dan pihak SMK, untuk menjadi masukan dalam pengembangan pembelajaran kewirausahaan.
 - b. Bagi Pemerintah dan kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Tangerang Banten, SMK Negeri 30 Jakarta DKI Jakarta dan SMK Negeri

- 2 Kota Depok Jawa Barat, untuk menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam pengembangan program kewirausahaan.
- c. Bagi para peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu pengalaman dan latihan guna memecahkan masalah secara nyata serta memperoleh gambaran yang nyata tentang implementasi nilai-nilai pendidikan kewirausahaan yang terjadi pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan dan hasil penelitian ini dapat menjadikan bahan masukan untuk melakukan penelitian lanjutan guna menyempurnakan pengembangan model program kewirausahaan di SMK.
 - d. Bagi siswa, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk memberi pengetahuan tentang sejauh mana implementasi nilai-nilai pendidikan kewirausahaan yang terjadi pada diri mereka sendiri dan sekolah mereka.
 - e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang implementasi nilai-nilai pendidikan kewirausahaan di jenjang pendidikan SMK.

F. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan disertasi ini adalah:

1. Dapat memberikan gambaran, informasi dan saran yang berguna bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Kemendikbud dan pengembangan program kewirausahaan Kementrian Pendidikan dan

Kebudayaan, agar dapat berfokus pada perbaikan sistem yang mendukung keefektifan pengembangan program pendidikan kewirausahaan.

2. Dapat memberikan kontribusi potensial kepada para pembaca mengenai pengembangan pendidikan kewirausahaan, khususnya yang berkaitan dengan membentuk sistem yang dapat mendukung dalam tingkat sekolah kejuruan.

G. Kebaruan Penelitian (Sate of The Art)

Penelitian kewirausahaan telah banyak dilakukan mulai dari kebijakan strategis hingga operasionalisasi pengembangan program pendidikan kewirausahaan. Namun dari segi tahapan pengembangan belum banyak yang melakukan penelitian terhadap model yaang komprehensif dan terintegrasi. Melalui metode evaluasi DEM yang dikombinasikan dengan model evaluasi Kirkpatrick dalam penelitian disertasi ini dapat diperoleh kebaruan berupa:

1. Penelitian disertasi ini menjadikan sebagai suatu usaha untuk mendorong peningkatan terhadap pengembangan program pendidikan kewirausahaan di sekolah kejuruan tidak hanya pada sistem tetapi juga pada SDM.
2. Pemodelan program pengembangan pendidikan kewirausahaan melalui tiga arah kebijakan yaitu: penetapan tujuan, lingkungan dan kesempatan. Penggunaan konsep ini untuk memahami keterkaitan faktor utama keberhasilan kewirausahaan dikalangan siswa menengah kejuruan.
3. Rumusan model transformasi penguatan kewirausahaan di sekolah menengah kejuruan yang terintegrasi dari seluruh pemegang kepentingan untuk berpihak

kepada para siswa sebagai calon wirausaha muda yang akan melakukan atau memulai bisnis secara *comprehensip* untuk mendorong kemudahan dalam melakukan usaha